

Analisis Peran Inspektorat dalam Pencegahan Tindakan Korupsi (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten)

Astri Nuraini^{1*} dan Rijadh Djatu Winardi²

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan gambaran mengenai peran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam pencegahan tindakan korupsi, menganalisis kendala serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam pencegahan tindakan korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Desa Jotangan, dan Desa Jeblog. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Inspektorat menghadapi kendala internal berupa ambiguitas peran, konflik peran dan peran berlebih. Inspektorat juga menghadapi kendala dari eksternal dalam melaksanakan peran pencegahan dalam tindakan korupsi. Adanya kendala yang dihadapi oleh Inspektorat membuat peran pencegahan menjadi belum optimal.

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel

Tanggal masuk 4 August 2025

Versi revisian diterima 8

September 2025

Diterima 11 September 2025

Kata kunci

Peran Pencegahan,
Inspektorat Daerah
Kabupaten Klaten,
Ambiguitas Peran, Konflik
Peran, Peran yang Berlebih

ISSN: 2302-1500

*Corresponding Author at Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
email: astri.n@mail.ugm.ac.id (author#1)

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang masih terus dihadapkan dengan kasus-kasus korupsi sampai saat ini. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* untuk tahun 2022, Indonesia mendapatkan skor 34 di bawah rata-rata global yaitu 43, dan menduduki peringkat 110 dari 180 negara (Annur 2023). Selain itu, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat jika terdapat kasus korupsi sebanyak 597 kasus dan negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp42,747 triliun (Novellino 2023).

Kasus korupsi sering terjadi dalam lembaga pemerintah. Data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa dua peringkat atas pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga adalah pemerintah desa dan kabupaten. Hal ini sejalan dengan laporan tren kasus korupsi berdasarkan aktor yang menunjukkan bahwa pegawai pemerintah daerah (pemda) dan kepala desa termasuk aktor yang paling banyak melakukan tindakan korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas perlu adanya peran dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk menjalankan fungsi pengawasan serta pembinaan di lembaga pemerintah. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau Inspektorat atau Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) menyatakan bahwa APIP memiliki beberapa peran diantaranya (1) *anticorruption activities*, APIP memberikan peringatan dini kepada instansi pemerintah mengenai potensi adanya penyimpangan, (2) *consulting activities*, APIP harus dapat memberikan pandangan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh instansi

pemerintah sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola, dan (3) *assurance activities*, APIP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dari fungsi instansi pemerintah.

APIP dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas intern pemerintah akan dinilai oleh BPKP sebagai instansi pembina APIP di Indonesia (Herubawa dan Ali 2019). BPKP akan menilai kapabilitas APIP dengan menggunakan model IACM dan membaginya menjadi lima level, yaitu level satu (*initial*), level dua (*infrastructure*), level tiga (*integrated*), level empat (*managed*), dan level lima (*optimizing*) (Herubawa dan Ali 2019). APIP dapat berperan secara efektif apabila sudah mencapai kapabilitas APIP level tiga (BPKP 2019). Namun, hal ini belum terjadi kepada Inspektorat Kabupaten Klaten yang sudah mencapai kapabilitas APIP level tiga tetapi Kabupaten Klaten menjadi daerah dengan kasus korupsi terbanyak se-Jawa Tengah dengan jumlah tujuh kasus dan kerugian negara sebesar Rp1.324.334.840,00.

Dapat dilihat bahwa kasus korupsi masih banyak terjadi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten meskipun kapabilitas APIP Kabupaten Klaten sudah mencapai level tiga. Dengan kapabilitas APIP yang cukup tinggi, maka APIP diharapkan tidak hanya mendeteksi adanya korupsi tetapi juga mencegah korupsi terjadi. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Lin (2012), Rinaldi dan Supriyono (2020), Zeng dkk. (2021), dan Holmes dkk. (2000) yang mengungkapkan bahwa auditor internal memiliki peran untuk mengurangi adanya *fraud* atau korupsi. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam pencegahan korupsi. Peneliti ingin menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam pencegahan korupsi.

Teori Peran Organisasi

Wickham dan Parker (2007) menyatakan

bahwa teori peran membahas mengenai peran yang dilakukan seseorang seperti tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari organisasi. Peran dalam pekerjaan harus diberikan organisasi kepada setiap individu atau karyawan agar organisasi dapat berjalan dengan efektif. Teori ini juga menjelaskan bahwa pembentukan peran melibatkan dua pihak, yaitu penerima peran (*focal person*) dan pengirim peran (*role sender*). Pengirim peran dalam penelitian ini adalah presiden, kepala daerah, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan amanat kepada inspektorat untuk melakukan pengawasan serta pembinaan sebagai penerima peran. Pengirim peran memberikan perintah kepada penerima peran mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan (Khelil dan Khlif 2022).

Ketika menerima pesan, penerima peran akan mengartikan dan menanggapi pesan berupa peran yang diberikan untuk memenuhi ekspektasi dari pengirim peran (Ahmad dan Taylor 2009; Roussy 2013). Ekspektasi atau harapan dapat muncul dari peran yang diberikan, pihak yang mendapatkan peran, masyarakat serta individu lain yang memiliki kepentingan (Khelil dan Khlif 2022). Dalam penelitian ini, ekspektasi diberikan oleh regulator selaku pihak yang menerbitkan peraturan (presiden, kepala daerah, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI), BPKP, dan lain-lain); organisasi perangkat daerah (OPD) selaku rekan kerja inspektorat; serta pihak lain yang memiliki kepentingan.

Penelitian ini membatasi ekspektasi yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) karena OPD selaku rekan kerja serta pihak utama yang berkepentingan terhadap Inspektorat Kabupaten Klaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten No. 53 Tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Klaten memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh OPD. Lebih lanjut, OPD juga menjadi organisasi yang bertanggungjawab untuk mengelola dana APBDes yang rawan untuk dilakukan korupsi. Pengirim peran yang berbeda-beda akan menimbulkan ekspektasi yang beragam pula.

<https://doi.org/10.22146/abis.v%vi%i.110037>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is published by Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Konsep penting dari sudut pandang ini dapat menimbulkan tekanan peran berupa ambiguitas peran, konflik peran, dan peran yang berlebih (Khelil dan Khlif 2022). Ambiguitas peran dihadapi Inspektorat karena struktur organisasi Inspektorat yang belum independen. Inspektorat diharapkan lebih independen dan objektif tetapi Inspektorat harus bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Konflik peran juga dihadapi oleh Inspektorat karena memiliki peran ganda yaitu asurans dan konsultasi. Selain itu, Inspektorat menghadapi peran yang berlebih dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inspektorat dihadapkan pada situasi dengan jumlah auditor yang belum cukup ideal sedangkan banyak tugas yang harus dikerjakan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Desa Jotangan, dan Desa Jeblog. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara semi-terstruktur dan revidi dokumen berupa peraturan bupati, piagam audit internal, PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, dan peraturan lain yang sesuai. Peneliti menggunakan teknik analisis tematik dengan melalui enam tahap, yaitu (1) pemahaman data, (2) pengkodean, (3) mencari tema, (4) merevidi tema, (5) mendefinisikan dan memberi nama tema, (6) membuat laporan. Untuk memastikan keterpercayaan data, peneliti melakukan *member checking*, serta triangulasi sumber dan teknik. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan hasil transkrip wawancara untuk menguji validitas dan reliabilitas.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam menjalankan aktivitas pengawasan intern, Inspektorat daerah harus secara proaktif mampu mencegah adanya penyimpangan dan tidak hanya bersifat reaktif dalam menghadapi permasalahan korupsi (Yunianto 2021). Inspektorat daerah sebagai

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

auditor intern pemerintah diharapkan dapat mewujudkan peran APIP yang efektif. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa APIP memiliki tugas terkait kegiatan antikorupsi, yaitu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko untuk mencegah adanya kecurangan. Peran pencegahan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten melalui asurans dan konsultasi.

Kegiatan asurans yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten adalah reviu dan *probity audit*. Kegiatan ini termuat dalam PKPT mengenai auditi yang akan dilakukan reviu atau *probity audit*. Terkait reviu harga perkiraan sementara (HPS) dan *probity audit* seringkali dilakukan apabila pihak OPD maupun pemerintah desa yang meminta kepada Inspektorat karena mereka lebih berhati-hati dengan kegiatan yang beresiko tinggi dan bukan menjadi kegiatan rutin dari Inspektorat.

Selain melakukan kegiatan asurans, Inspektorat juga memberikan jasa konsultasi. Beberapa kegiatan konsultasi yang dilakukan Inspektorat adalah membuat program-program seperti Inspektorat In-House Training (Insting), sekolah berintegritas, dan desa antikorupsi. Kegiatan tersebut sudah terjadwal dalam PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Selain kegiatan yang terjadwal, Inspektorat juga dapat memberikan jasa konsultasi yang insidental.

Peneliti menemukan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam pencegahan korupsi sudah membuat beberapa program dalam bentuk konsultasi, sedangkan pencegahan melalui peran asurans masih belum optimal. Reviu HPS dan *probity audit* dilakukan apabila ada permintaan dari OPD atau desa dan tidak semua proyek dilakukan reviu HPS dan *probity audit*, padahal dua hal tersebut penting dilakukan Inspektorat karena proyek pembangunan menjadi salah satu area yang rawan untuk dilakukan korupsi.

Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan identifikasi kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dengan menggunakan teori peran organisasi. Berdasarkan penelitian Wickham dan Parker (2007), teori peran organisasi membahas mengenai peran yang dilakukan seseorang seperti tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari organisasi. Peran dalam pekerjaan harus diberikan organisasi kepada setiap individu atau karyawan agar organisasi dapat berjalan dengan efektif. Teori ini juga menjelaskan bahwa pembentukan peran melibatkan dua pihak, yaitu penerima peran (*focal person*) dan pengirim peran (*role sender*). Pengirim peran dalam penelitian ini adalah presiden, kepala daerah, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan amanat kepada inspektorat untuk melakukan pengawasan serta pembinaan sebagai penerima peran. Pengirim peran memberikan perintah kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Khelil dan Khlif (2022) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi peran individu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu ambiguitas peran, konflik peran, dan peran yang berlebihan. Berdasarkan PP No 72 Tahun 2019, peran dan kapasitas dari Inspektorat Daerah diharapkan menjadi lebih independen dan objektif untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang bebas dan bersih dari korupsi. Di sisi lain, Inspektorat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah. Hal ini membuat Inspektorat menghadapi ambiguitas peran karena struktur organisasi yang belum independen. Kondisi ini membuat kinerja Inspektorat tidak berjalan dengan optimal.

Peneliti juga menemukan adanya konflik peran, yaitu kondisi ketika auditor harus menjalankan peran konsultasi dan audit yang saling bertentangan (Ahmad dan Taylor 2009). Inspektorat sebagai auditor intern harus independen ketika menjalankan peran asurans.

<https://doi.org/10.22146/abis.v%vi%i.110037>

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is published by Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Akan tetapi, di sisi lain, Inspektorat juga harus memberikan layanan konsultasi sebagai bentuk pemberian peran konsultasi. Berdasarkan penjelasan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten memiliki dua peran yaitu sebagai pengawas dan konsultan. Kondisi ini menuntut Inspektorat untuk bersikap profesional dan independen ketika menjalankan peran asurans, tapi juga sebagai mitra ketika menjalankan peran konsultasi. Konsultasi dapat dilakukan melalui *whatsapp*, telepon, atau para auditi datang langsung ke Inspektorat. Kegiatan konsultasi dapat terjadi pada saat auditor intern melakukan audit, sehingga hal ini menimbulkan keraguan dengan independensi yang dimiliki auditor intern tersebut. Adanya kondisi ini bisa menimbulkan konflik peran yang dialami oleh Inspektorat. Auditor intern memiliki situasi sulit karena auditi seringkali langsung menanyakan saran atau rekomendasi kepada auditor intern pada saat mereka menjalankan peran asurans.

Selain konflik peran, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten juga menghadapi peran yang berlebih. Peran yang berlebih terbentuk ketika ekspektasi peran yang terlalu banyak tetapi penerima peran tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi tersebut karena waktu serta kemampuan yang terbatas (Khelil dan Khelif 2022). Auditor intern di Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten menghadapi peran yang berlebih karena mereka harus melakukan peran asurans dan konsultasi kepada seluruh desa dan OPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Klaten. Terdapat 391 desa, 10 kelurahan, dan 56 OPD yang harus diawasi dan dibina oleh Inspektorat. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah auditor yang baru mencapai 61 orang yang idealnya berjumlah 132 orang.

Ambiguitas peran, konflik peran dan peran yang berlebih yang dialami oleh auditor intern dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja mereka. Apabila auditor intern mendapatkan beban kerja yang sangat berat, hal ini menjadi tekanan yang besar bagi auditor intern sehingga kinerja yang dihasilkan menjadi tidak maksimal. Selain menjalankan kegiatan

mandatori yang terjadwal dalam PKPT, Inspektorat seringkali mendapat tugas di luar tugas yang sudah ada. Hal ini menyebabkan Inspektorat semakin sulit dalam menjalankan peran asurans dan konsultasi secara lebih mendetail. Inspektorat hanya dapat melakukan *sampling* sehingga tidak bisa semua desa diawasi. Hal ini memberikan peluang dan kesempatan untuk dilakukan kecurangan karena tidak semua desa setiap tahun dilakukan pemeriksaan.

Faktor dari luar Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten juga memberikan peluang untuk dilakukan kecurangan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan bahwa lemahnya SPIP desa dan kurangnya kompetensi dari aparat desa menjadi pemicu kecurangan yang terjadi di pemerintah desa. Kasus korupsi yang terjadi di desa seringkali terjadi karena aparat desa yang tidak mengetahui mengenai administrasi yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti menemukan bahwa Desa Jotangan, yaitu desa yang pernah ada kasus mengenai korupsi, enggan bertanya atau berkonsultasi kepada Inspektorat apabila ada hal yang kurang dipahami. Hal ini dikarenakan mereka melihat Inspektorat sebagai pengawas yang ditakuti dan disegani. Hal yang berbeda disampaikan oleh partisipan dari Desa Jeblog, yaitu desa yang menjadi percontohan desa antikorupsi. Partisipan dari Desa Jeblog memandang Inspektorat sebagai rekan atau mitra, sehingga mereka tidak segan untuk berkonsultasi atau bertanya kepada Inspektorat apabila ada hal yang kurang dipahami. Hal tersebut membantu meminimalisasi kesalahan administrasi yang bisa menjadi temuan dari Inspektorat.

Selain itu, peneliti menemukan bahwa perlu adanya koordinasi antar aparat desa agar kasus kecurangan bisa diminimalisasi. Berdasarkan wawancara dengan partisipan dari Desa Jotangan ditemukan bahwa mereka belum melakukan rapat secara rutin dan hanya dilakukan jika ada permasalahan yang harus didiskusikan. Hal ini berbeda dengan Desa Jeblog yang secara rutin melakukan rapat pada hari senin setiap minggu agar koordinasi antar

<https://doi.org/10.22146/abis.v%vi%i.110037>

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is published by Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

aparatus desa dapat berjalan dengan baik dan apabila ada permasalahan dapat segera diselesaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Matei dkk. (2017) yang menyatakan bahwa Inspektorat menghadapi kendala internal dan eksternal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari Herubawa dan Ali (2019) yang menjelaskan bahwa jumlah auditor yang terbatas menjadi kendala bagi Inspektorat dalam menjalankan peran konsultansi. Kurangnya jumlah auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten berpengaruh terhadap kualitas Inspektorat dalam menjalankan peran pencegahan karena beban kerja yang lebih besar membuat kinerja menjadi tidak optimal.

Penelitian ini melengkapi penelitian dari Matei dkk. (2017) dengan menambahkan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Inspektorat. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten untuk meminimalisasi kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi kendala internal diantaranya adalah penambahan SDM, peningkatan kompetensi auditor, dan pembentukan Irbansus. Kurangnya jumlah SDM menjadi kendala bagi Inspektorat. Oleh karena itu, Inspektorat berusaha untuk mengusulkan menambah SDM. Meskipun Inspektorat sudah mengusulkan untuk menambah pegawai, akan tetapi terkait formasi pegawai ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan bupati. Hal ini membuat Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten melakukan upaya lain dengan meningkatkan kompetensi auditor yang sudah ada karena mereka belum tentu mendapatkan pegawai baru tiap tahunnya. Selain itu, Inspektorat juga membentuk Irbansus yang menjadi titik balik dari kegiatan pencegahan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini disebabkan program-program yang ada dalam kegiatan konsultansi merupakan salah satu tugas dari Irbansus.

Selain upaya untuk mengatasi kendala internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten juga melakukan upaya untuk mengatasi kendala eksternal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan jasa konsultansi. Adanya pergeseran paradigma membuat Inspektorat tidak hanya menjalankan kegiatan asuransi tetapi juga kegiatan konsultansi. Jasa konsultansi diperlukan agar tidak terjadi temuan berulang. Apabila terjadi kesalahan dan hanya dilakukan audit, maka potensi temuan akan terus berulang. Maka dari itu, Inspektorat selaku auditor intern pemerintah memberikan jasa konsultansi untuk meminimalisasi kejadian tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah penggunaan aplikasi sistem keuangan daerah (siskeudes). Penggunaan aplikasi siskeudes membantu Inspektorat dan Dispermasdes dalam memantau pengelolaan keuangan desa.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan gambaran mengenai peran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam pencegahan tindakan korupsi serta menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam pencegahan tindakan korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek utama dalam penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini dikarenakan Inspektorat Kabupaten Klaten memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan serta Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten lebih memahami terkait kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Selain itu, peneliti juga memilih Desa Jeblog, Desa Jotangan, dan Dispermasdes sebagai objek tambahan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi tambahan dari sudut pandang pemerintah desa selaku *auditee* dari Inspektorat dan Dispermasdes selaku pihak yang berkoordinasi dengan Inspektorat terkait pencegahan korupsi.

Peneliti menemukan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam pencegahan

<https://doi.org/10.22146/abis.v%vi%i.110037>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is published by Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

korupsi sudah membuat beberapa program dalam bentuk konsultasi, sedangkan pencegahan melalui peran asurans masih belum optimal. Kegiatan asurans yang dilakukan oleh Inspektorat adalah reuiu dan *probity audit*. Reuiu HPS dan *probity audit* dilakukan apabila ada permintaan dari OPD atau desa dan tidak semua proyek dilakukan reuiu HPS dan *probity audit*, padahal dua hal ini penting dilakukan oleh Inspektorat karena proyek pembangunan menjadi salah satu area yang rawan untuk dilakukan korupsi. Inspektorat juga menjalankan kegiatan konsultasi dengan membuat beberapa program seperti Inspektorat In-House Training (Insting), sekolah berintegritas, dan desa antikorupsi. Kegiatan tersebut sudah terjadwal dalam PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Selain kegiatan yang terjadwal, Inspektorat juga dapat memberikan jasa konsultasi yang insidental.

Peneliti menemukan bahwa Inspektorat menghadapi kendala internal berupa ambiguitas peran, konflik peran dan peran yang berlebih. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten juga menghadapi kendala eksternal yaitu lemahnya SPIP Desa dan kurangnya kompetensi aparat desa. Dengan adanya kendala internal dan eksternal membuat peran pencegahan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten menjadi belum optimal.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten untuk meminimalisasi kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi kendala internal diantaranya adalah penambahan SDM, peningkatan kompetensi auditor, dan pembentukan Irbansus. Selain upaya untuk mengatasi kendala internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten juga melakukan upaya untuk mengatasi kendala eksternal. Upaya yang dilakukan meliputi penggunaan jasa konsultasi dan aplikasi sistem keuangan daerah (siskeudes).

Keterbatasan

<https://doi.org/10.22146/abis.v%vi%i.110037>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is published by Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peneliti tidak dapat mewawancarai Camat dan Seksi Pemerintahan Kecamatan Karangnom karena tidak berkenan untuk dilakukan wawancara. Hal ini membuat peneliti tidak mendapatkan data terkait dengan peran pencegahan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten serta pembinaan dari Kecamatan Karangnom terhadap Desa Jotangan.
2. Data dari hasil penelitian kurang relevan karena diambil pada tahun 2023.
3. Penelitian ini tidak membahas secara spesifik suatu kasus korupsi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. **Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten**
Peneliti menyarankan Inspektorat agar mengajukan penambahan jumlah auditor yang bersifat mendesak ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Adanya penambahan jumlah auditor dapat meminimalisasi kendala internal yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten lebih rutin melakukan peran pencegahan dalam kegiatan asurans yang dijalankan, yaitu melakukan reuiu dan *probity audit*. Melalui reuiu dan *probity audit*, Inspektorat dapat meminimalisasi kecurangan karena pengawasan dilakukan dari tahap awal suatu kegiatan.
2. **Kebijakan atau Regulasi**
Peneliti menyarankan agar Inspektorat Daerah menjadi instansi yang lebih independen dengan tidak berkedudukan dibawah bupati dan tidak bertanggung jawab ke bupati. Inspektorat Daerah dapat berkedudukan sejajar dengan sekretaris daerah dan bertanggung jawab ke Inspektorat Provinsi atau gubernur. Hal ini membantu Inspektorat Daerah menjadi lebih independen dan objektif dalam

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar mengeksplorasi sebuah kasus sehingga penelitian memiliki ruang lingkup lebih sempit dan pembahasan yang lebih spesifik. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan observasi ke lapangan agar data hasil penelitian dapat lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zaini, dan Dennis Taylor. 2009. "Commitment to independence by internal auditors: The effects of role ambiguity and role conflict." *Managerial Auditing Journal* 24, no. 9: 899–925. <https://doi.org/10.1108/02686900910994827>.
- Ahmed, Sirwan Khalid. 2024. "The pillars of trustworthiness in qualitative research." *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health* 2, no. January: 100051. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051>.
- Albrech, W., C.O. Albrech, C.C. Albrech, dan M.F. Zimbelman. 2011. *Fraud Examination*.
- Annur, Cindy Mutia. 2023. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022." 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022>.
- BPKP.2019. "Situs ResmiBPKP-RI." 2019. <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/31/22895/0/Kiprah-APIP-dalam-Pencegahan-Korupsi>.
- Clarke, V., dan V. Braun. 2013. "Teaching Thematic Analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning." *The Psychologist* 26, no.2:120–23. <https://doi.org/10.4135/9781412963909.n451>.
- Fitriana, Lila, dan Hardo Basuki. 2013. "Evaluasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo)." *Journal of UGM* 53, no. 9: 1689–99.
- Fondas, Nanette, dan Rosemary Stewart. 1994. "ENACTMENT IN MANAGERIAL JOBS : A ROLE ANALYSIS * Research into managerial jobs and behaviour has been appropriately criticized for being acontextual and atheoretical . Hales (1986) suggested that role theory could provide one suitable theoretical fram," no. January.
- Griffin, Mark A., Andrew Neal, dan Sharon K. Parker. 2007. "A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts." *Academy of Management Journal* 50, no. 2: 327–47. <https://doi.org/10.5465/AMJ.2007.24634438>.
- Hairul, Tasdikul. 2022. "Analisis Peran Inspektorat dalam Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci)." Universitas Gajah Mada.
- Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey. 2019. *Qualitative Research Methods*. Herubawa, Dio Agung, dan Syaiful Ali. 2019. "Evaluasi Peran Pemberian Konsultansi Inspektorat Daerah: Studi Kasus Pada Kabupaten Padang Lawas Utara." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 19, no. 1: 13. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.293>.
- Holmes, Sarah A., Jeffrey W. Strawser, dan Sandra T. Welch. 2000. "Fraud in the governmental and private sectors." *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 12, no. 3: 345–69. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-12-032000-b001>.
- Inspektorat Daerah. 2016. "Mempertajam Peran APIP dalam Memberantas Korupsi Inspektorat Daerah." 2016. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/mempertajam-> <https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

<https://doi.org/10.22146/abis.v%vi%i.110037>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is published by Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada

- [peran-apip-dalam](#) memberantas-korupsi-31.
- Khelil, Imen, dan Hichem Khelif. 2022. "Internal auditors' perceptions of their role as assurance providers: a qualitative study in the Tunisian public sector." *Meditari Accountancy Research* 30, no. 1: 121–41. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-04-2020-0861>.
- Klaten, Pemerintah Kabupaten. 2021. *Peraturan Bupati Klaten No. 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten*. Vol. 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. "Titik rawan korupsi dipemerintah daerah menurut KPK." 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/702200/titik-rawan-korupsi-di-pemerintah-daerah-menurut-kpk>.
- Liu, Jin, dan Bin Lin. 2012. "Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data." *China Journal of Accounting Research* 5, no. 2: 163–86. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Matei, Angela Mulyani, Herman Karamoy, dan Linda Lambey. 2017. "Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8, no. 1: 86–96. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15328>.
- Matkin, David S.T. 2010. "Before there was enron, there was orange county: A study of local government financial-oversight committees." *Public Budgeting and Finance* 30, no. 3: 27–50. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2010.00961.x>.
- Mettler, Cory J. 2023. "Introduction of Case Study Teams." *Engineering Design*, 25–32. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23309-8_2. <https://doi.org/10.22146/abis.v%vi%i.110037>
- Moeller, Robert R. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing A Common Body of Knowledge*. Eight Edit. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Novellno, Andy. 2023. "ICW: Kejagung Kalahkan KPK Tangani Kasus Korupsi Terbesar Selama 2022." 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230303192621-12-920584/icw-kejagung-kalahkan-kpk-tangani-kasus-korupsi-terbesar-selama-2022>.
- Peltier-Rivest, Dominic. 2018. "A model for preventing corruption." *Journal of Financial Crime* 25, no. 2: 545–61. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2014-0048>.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. 2008.
- Rahayu, Sri, Yudi Yudi, dan Rahayu Rahayu. 2019. "Strategi Penerapan Paradigma Baru Dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah." *Journal of Applied Managerial Accounting* 2, no. 2: 255–61. <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.1100>.
- inaldi, Rina Putri, dan R A Supriyono. 2020. "Kata kunci: peran audit internal, pencegahan korupsi, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah."
- Roussy, Mélanie. 2013. "Internal auditors' roles: From watchdogs to helpers and protectors of the top manager." *Critical Perspectives on Accounting* 24, no. 7–8: 550–71. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.08.004>.
- Suseno, Ponco. 2023. "Jalan Panjang Desa Jeblog Klaten hingga Akhirnya Terpilih Jadi Desa Antikorupsi." 2023. <https://soloraya.solopos.com/jalan-panjang-desa-jeblog-klaten-hingga-akhirnya-terpilih-jadi-desa-antikorupsi-1642406>.
- Tuanakotta, T.M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wickham, Mark, dan Melissa Parker. 2007. "Reconceptualising organisational role theory for contemporary organisational

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is published by Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

- contexts.” *Journal of Managerial Psychology* 22, no. 5: 440–64. <https://doi.org/10.1108/02683940710757182>.
- Yunianto, Joko. 2021. “Refleksi Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa.” 2021. <http://itjen.menlhk.go.id/artikel/refleksi-peran-apip-dalam-pencegahan-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa/1>.
- Zeng, Huixiang, Li Yang, dan Jing Shi. 2021. “Does the supervisory ability of internal audit executives affect the occurrence of corporate fraud? Evidence from small and medium-sized listed enterprises in China.” *International Journal of Accounting and Information Management* 29, no. 1: 1–26. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-02-2020-0020>.